

ABSTRAK

Sekarang ini di Kota Jambi masih terjadi kekurangan lahan pemakaman, sementara rencana perluasannya selalu terhambat oleh masalah pembebasan lahan. Apalagi pada kenyataan seperti sekarang ini maka luas lahan yang dijadikan tempat pemakaman umum tidak sesuai dengan perkiraan rata-rata angka kematian per hari di Kota Jambi. Walaupun telah ada Peraturan Daerah Kota Jambi yang mengatur terkait dengan pemakaman umum akan tetapi pada kenyataan di lapangan, masih banyak masyarakat Kota Jambi yang melakukan penguburan dan pemakaman jenazah yang belum efektif. Kemudian dalam metode penelitian yang digunakan bertipe penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode penekanan yaitu pendekatan sosiologi hukum dan spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif. Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sehingga teknik penarikan sampel yaitu Purpose sampling dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen sehingga analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Untuk hasil dari penelitian ini adalah Efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi adalah belum efektif karena masih ada pemakaman yang over kapasitas dan penataan pemakaman di kota Jambi belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dan faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum dalam penataan pemakaman oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi adalah lokasi pemakaman over kapasitas, sulitnya dilakukan penataan, penguburan dilakukan tumpang tindik oleh petugas gali kubur karena kesulitan untuk mencari lokasi kuburan yang akan digali, pihak Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi tidak menerima laporan terkait dengan jumlah orang yang meninggal di setiap tempat pemakaman umum dan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi menyediakan tempat namun cukup jauh dari masyarakat kota serta belum ada dilakukan sosialisasi terkait dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum.

Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan Daerah, Kota Jambi, Pemakaman Umum, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

ABSTRACT

Currently in Jambi City there is still a shortage of burial land, while expansion plans are always hampered by land acquisition problems. Moreover, in the current reality, the area of land used as a public cemetery does not match the estimated average death rate per day in Jambi City. Even though there is a Jambi City Regional Regulation that regulates public burials, in reality on the ground, there are still many people in Jambi City who carry out burials and burying bodies that are not yet effective. Then the research method used is empirical juridical research using an emphasis method, namely a legal sociology approach and research specifications in the form of descriptive research. The data sources used in this research are field research and library research so that the sampling technique is purpose sampling using data collection techniques in the form of interviews and document studies so that the data analysis used is qualitative analysis. The results of this research are that the effectiveness of Jambi City Regional Regulation Number 10 of 2009 concerning Public Funeral Services in arranging burials by the Jambi City Public Housing and Settlement Area Service is not yet effective because there are still cemeteries that are overcapacity and the burial arrangements in Jambi City are not in accordance with Jambi City Regional Regulation Number 10 of 2009 concerning Public Funeral Services and factors that influence the effectiveness of Jambi City Regional Regulation Number 10 of 2009 concerning Public Funeral Services in arranging burials by the Jambi City Public Housing and Residential Area Service is that the burial location is over capacity, the arrangement is difficult, burials were carried out overlapping by gravediggers because it was difficult to find the location of the grave to be dug, the Jambi City Public Housing and Settlement Area Service did not receive reports regarding the number of people who died in each public cemetery and the Public Housing and City Settlement Area Service Jambi provides a place but it is quite far from the city community and there has been no socialization related to Jambi City Regional Regulation Number 10 of 2009 concerning Public Funeral Services.

Keywords: Effectiveness, Regional Regulations, Jambi City, Public Cemeteries, Public Housing Service and Jambi City Residential Areas